Media Konservasi Vol. III (2), April 1991 : 10 - 20

KELOMPOK PELESTARI LINGKUNGAN

Tutut Sunarminto*

ABSTRACT

Enviromental problem is social problem inclusive of some important social problem. That problem is faced by public in the same relative dimension and causes.

Solution of social problem must social way, especially institution aproximation. To rise and to develope Enviromental Conservation Group (ECG) is an alternative solution enviromental problem with institution aproximation. Basically ECG is informal institution that's developed from, by and for public with institutional pleasent life norm that insight increased enviromental quality with good planning.

PENDAHULUAN

Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya disebut lingkungan hidup makhluk tersebut (Soemarwoto, 1987 : 45). Dalam makalah ini selanjutnya yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup manusia kecuali apabila ada keterangan lain.

Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler, artinya segala aktifitas manusia akan memberikan akibat langsung maupun tidak langsung kepada manusia dan selanjutnya akan berbalik kembali memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia. Secara sederhana dapat dicontohkan, misalnya pembuangan sampah dilakukan oleh seseorang kedalam parit di depan rumahnya. Sebagai akibatnya dalam waktu tertentu aliran air tidak lancar dan bahkan kemudian menimbulkan genangan air di sekitar rumahnya. Akibat selanjutnya suasana di sekitar rumahnya menjadi tidak nyaman dan mengundang kuman-kuman penyakit pada air menggenang yang pada gilirannya menyebabkan gangguan kesehatan pada penghuni rumah tersebut.

---

* Staf Pengajar Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB

Dengan uraian di atas timbul pertanyaan, apakah perbuatan salah seorang di atas hanya akan menimbulkan dampak negatif kepadanya dan penghuni rumahnya yang lain ? Jawabnya "tidak". Terhambatnya aliran air juga akan berakibat kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya (di lingkungannya). Masyarakat sekitar juga akan mengalami keadaan air menggenang di halaman rumah mereka, kuman penyakit muncul dan wabah penyakit mengganggu kesehatan mereka.

Masalah yang dipaparkan tadi merupakan suatu gambaran sederhana untuk menunjukkan bahwa masalah lingkungan hidup tidak sekedar masalah berdimensi individu per individu melainkan masalah yang berdimensi sosial. Soekanto (1987 : 349 - 365) memasukkan masalah lingkungan hidup dalam katagori beberapa problema sosial yang penting. Problema-problema ini dihadapi oleh masyarakat secara umum, dalam takaran yang relatif sama dan dengan penyebab yang relatif sama pula.

Pemecahan masalah yang berdimensi sosial haruslah dipecahkan secara sosial pula. Salah satu bentuk pemecahan masalah sosial adalah dengan pendekatan lembaga kemasyarakatan. Artinya masalah bersama diantara anggota masyarakat dipecahkan secara bersama dengan meng-gunakan kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut. Menurut Koentjaraningrat (1964 : 13) dalam Soekanto (1987 : 177) yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan adalah pranata sosial, yaitu suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Soekanto (1987 : 178) selanjutnya memberikan batasan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Dari kedua definisi tentang lembaga kemasyarakatan ditunjukkan bahwa perhatian utama dalam memahami lembaga sosial terletak pada tekanan akan keperluan pokok manusia dan sistem perilaku yang terorganisasi. Menurut Hubeis dan Tonny (1990) dalam Anonim (1990 : IV - 1) lembaga sosial merupakan tata abstraksi sistem sosial yang lebih tinggi dari kelompok, organisasi maupun sistem-sistem sosial yang lain. Dengan pengertian ini maka kemunculan lembaga sosial dapat dimulai melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan dapat ditumbuhkan dan dikembangkan kelompok-kelompok pelestari lingkungan (KPL) untuk dijadikan wahana melembagakan norma-norma pengelolaan lingkungan yang berwawasan meningkatkan mutu lingkungan secara lestari.

CIRI-CIRI DAN TIPE-TIPE KELEMBAGAAN

Bentuk kelembagaan masyarakat berkembang melalui proses pelembagaan sosial dan sebagian besar merupakan produk kehidupan masyarakat. Proses pelembagaan dapat terwujud tanpa direncanakan, namun ada pula yang direncanakan untuk memenuhi tuntutan keperluan masyarakat.

Setiap kelembagaan sosial mempunyai norma dan sanksi sosial yang mengatur cara bertindak warganya dalam mencapai keperluan mereka. Secara garis besar, ciri-ciri umum suatu lembaga kemasyarakatan menurut Gillin dan Gillin <u>dalam</u> Sukanto (1987 : 188) adalah sebagai berikut :

(1) organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perikelakuan yang terwujud oleh aktivitas kemasyarakatan;

(2) memilih tingkat kekekalan tertentu;

(3) mempunyai suatu tujuan atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dalam hal ini tujuan lembaga yang baik biasanya dirumuskan sejalan dengan tujuan individu yang ingin dicapai dan terlibat dalam kegiatan lembaga tersebut;

(4) mempunyai alat-alat untuk mencapai tujuan lembaga, seperti fasilitas gedung dan peralatan sebagai perangkat keras serta anggota dan pengurusnya sebagai perangkat lunak;

(5) memilih lambang kelembagaan yang biasanya disesuaikan dengan tujuan dan gengsi kelembagaan tersebut, misalnya lembaga kelompok pelestari lingkungan pada papan namanya dicantumkan program-program yang ingin dicapai; dan

(6) memilih peraturan tertulis dan tidak tertulis, seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) biasanya dikunjungi kaum ibu bukan kaum bapak. Peraturan tertulis tentang hal ini tidak ada, tetapi menurut norma masyarakat yang masih berlaku, urusan anak adalah urusan kaum ibu (perempuan), bukan kaum bapak (lelaki). Peraturan tertulis mengatakan bahwa Posyandu memberikan pelayanan kepada perempuan (ibu hamil dan ibu menyusui) dan balita pada periode tertentu, sehingga petugas dan kader Posyandu, khususnya UPGK tahu kapan mereka bertugas dan masyarakatpun tahu kapan mereka mendapatkan pelayanan serta siapa yang dapat dilayani.

Berdasarkan ciri-ciri umum kelembagaan, maka dapat dibedakan beberapa tipe kelembagaan yang ada di daerah pedesaan serta bagaimana kelembagaan-kelembagaan tersebut dimanfaatkan dalam program pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Secara garis besar kelembagaan di pedesaan yang umum ditemui menurut Hubeis dan Tonny (1990) <u>dalam</u> Anonim (1990 : IV-2 dan 3) antara lain :

PELEMBAGAAN NORMA-NORMA KELOMPOK PELESTARI LINGKUNGAN (KPL)

Problema (masalah) sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok dari warga-warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebakan rusaknya ikatan sosial (Gillin dan Gillin dalam Hubeis (1989 :3-4) dipengaruhi oleh sembilan faktor, yaitu:

(1) Tujuan Kelompok
Tujuan menggambarkan yang akan dicapai oleh kelompok, sehingga untuk itu diperlukan berbagai usaha dari anggota untuk mencapainya. Keterlibatan anggota dalam hal ini dapat dibedakan atas tujuan bermotif kelompok dan tujuan bermotif pribadi. Jika kedua tujuan ini dapat dicapai sekaligus, maka dikatakan kelompok itu mempunyai tujuan yang baik.

(2) Struktur Kelompok
Struktur kelompok adalah bentuk hubungan dan pengaturan peranan antara individu-individu didalam kelompok yang ditentukan oleh tujuan kelompok yang ingin dicapai. Selain itu struktur kelompok dicirikan oleh adanya unsur kekuasaan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan, pengendalian dan pengawasan yang menjamin adanya komunikasi di antara anggota dan pengurus

(3) Fungsi Tugas
Fungsi tugas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam kelompok, sehingga tujuan kelompok tercapai. Untuk itu fungsi tugas harus dilakukan dalam kelompok dan oleh siapapun. Fungsi tugas ini akan berjalan baik jika anggota kelompok mendapatkan kepuasan batin, memperoleh informasi yang dibutuhkan, ada orang yang mengkoordinir kegiatan dan ada penjelasan tentang hal-hal yang terjadi dalam kelompok.

(4) Pengembangan dan Pemeliharaan Kelompok
Pengembangan dan pemeliharaan kelompok merupakan fungsi tugas yang berorientasi pada kehidupan kelompok, sebab tanpa adanya kegiatan ini kelompok akan mati atau bubar. Kelangsungannya ditentukan oleh partisipasi anggota, fasilitas kelompok untuk kemudahan anggota, adanya kegiatan yang dilakukan kelompok, ada koordinasi dan komunikasi, ada

proses ajar dalam penentuan perilaku baku dan penambahan jumlah anggota kelompok.

(5) Kekompakan Kelompok
Kekompakan kelompok dikatakan sebagai kesatuan kelompok yang dicirikan oleh keterikatan yang kuat di antara anggota dan juga menggambarkan kekuatan kelompok yang tidak saja tahan terhadap goncangan dari luar,tetapi juga mampu memukul ke dalam. Dalam hal ini komitmen dan keterikatan batin anggota terhadap kelompok merupakan prasyarat dasar.

(6) Suasana Kelompok
Suasana kelompok adalah perasaan-perasaan yang ada pada diri anggota secara umum dan lingkungannya serta adanya kelonggaran dalam mengikuti perilaku baku yang ditetapkan kelompok.

(7) Tekanan Kelompok
Tekanan kelompok adalah tegangan yang disebabkan tekanan dari dalam kelompok atau dari luar kelompok. Hal ini dapat ditelusuri dari homogenitas anggota, baik dalam hal minat maupun perilaku lainnya.

(8) Keberhasilan Kelompok
Dinamika kelompok menyebabkan kelompok efektif dan sebaliknya keberhasilan kelompok akan menyebabkan kelompok menjadi lebih dinamis.

(9) Maksud-maksud Tersembunyi
Maksud tersembunyi adalah sesuatu yang ada di bawah permukaan, sehingga orang bersangkutan tidak sadar atau tidak pernah mampu mengemukakannnya secara terbuka.

Tekanan perhatian dinamika kelompok adalah pada aspek psikologis manusia dalam upaya meramalkan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini persepsi anggota terhadap arti dan fungsi kelompok menjadi penting, karena inilah yang menentukan sikap mereka terhadap usaha kelompok. Sedangkan tinjauan dinamika kelompok dari sudut sosiologis lebih diarahkan pada interaksi antara manusia dan melihat kelompok sebagai satu sistem sosial.

Sembilan faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi proses pelembagaan norma-norma KPL dalam diri para anggotanya. Tugas pembinaan dalam hal ini adalah selalu mengupayakan agar kesembilan faktor ini memberikan nilai positif terhadap proses pelembagaan norma. Untuk itu seorang pembina harus secara seksama memantau perkembangan aktivitas kelompok yang dibinanya. Pertemuan-pertemuan informal dalam bentuk kunjungan rumah (salah satu bentuk teknik penyuluhan) anggota kelompok dan pemuka masyarakat yang membicarakan kelangsungan kelompok sangat baik untuk dilakukan oleh pembina KPL secara intensif.

Soekanto (1987:180) membedakan kekuatan mengikat pada norma dalam empat tingkatan, yaitu :

(1) **Cara (usage)**
Bentuk norma yang lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya, tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

(2) **Kebiasaan (Foldkways)**
Memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan berulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan suatu bukti bahwa banyak orang yang menyukai perbuatan tersebut.

(3) **Tata Kelakuan (Mores)**
Suatu pengembang lebih lanjut dari kebiasaan, yaitu dalam hal ini kebiasaan tidak semata-mata dianggap sebagai cara berpelikelakuan saja, akan tetapi bahkan diterima sebagai norma-norma pengatur. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

(4) **Adat Istiadat (Custom)**
Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat dapat meningkat kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat. Anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan memberikan sangsi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlukan. Dalam kaitan ini semua anggota masyarakat yang seadat harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahkan individu-individu dari kelompok sosial yang lain bila memasuki wilayah masyarakat tertentu, maka baginya juga berlaku hukum/adat istiadat di wilayah tersebut.

Dikaitkan dengan aktivitas KPL, yang menjadi masalah untuk dipecahkan adalah bagaimana cara hidup yang menjaga kelestarian lingkungan menjadi suatu adat istiadat yang mengikat. Saat ini telah dicoba menerapkan norma hidup yang menjaga kebersihan lingkungan. Di beberapa kota, seperti Bukit Tinggi, Padang, Surabaya, Bogor dan lainnya telah ditetapkan peraturan formal (Peraturan Daerah) mengenai kebersihan kota dengan pengenaan sangsi-sangsi bagi pelanggarnya. Kebijaksanaan yang diambiloleh beberapa Pemerintah Daerah tersebut merupakan suatu ikhtiar untuk menjadikan hidup bersih sebagai suatu tata kelakuan yang diharapkan pada gilirannya akan melembaga pada setiap diri warganya, sehingga menjadi suatu budaya yang mengakar.

MANAJEMEN DAN STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK PELESTARI LINGKUNGAN (KPL)

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemim-pinan dan upaya pengendalian anggota organisasi serta proses penggunaan semua sumberdaya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (stoner dan Wankel, 1988:4). Dengan mengacu kepada defisi ini, KPL sebagai suatu bentuk organisasi pada pengembangannya yang lebih lanjut menjelma menjadi sutu organisasi sosial hendaknya mempunyai perencanaan kerja yang jelas untuk mengorganisasikan semua sumberdaya yang dimiliki secara terkendali demi tercapainya tujuan kelompok secara utuh.

Salah satu syarat pokok keberhasilan suatu manajemen organisasi adalah ketepatan organisasi tersebut memilih struktur organisasinya. Yang menjadi pertanyaan adalah struktur organisasi manakah yang sesuai untuk Kelompok Pelestari Lingkungan (KPL)?

Sebelumnya marilah didefinisikan KPL yang hendak dibentuk. Misalkan saja, KPL adalah suatu wadah/kelompok sosial yang beranggotakan warga masyarakat di suatu wilayah tertentu (cakupan dusun, desa dan sebagainya) yang secara bersama melakukan aktivitas di bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup anggota kelompok secara lestari. Dari batasan tersebut tampak bahwa organisasi yang dibentuk merupakan organisasi sosial dengan wilayah kerja bersesuaian dengan wilayah administrasi pemerintahan desa ke bawah dan beranggotakan warga masyarakat wilayah tersebut.

Dengan batasan di atas, maka bentuk/struktur organisasi KPL tidak perlu disusun secara rumit. Sebaiknya struktur organisasi dibuat mirip halnya dengan struktur organisasi Kelompok Tani, Kelompencapir dan dalam perkembangannya mirip pemerintahan desa, yaitu ada koordinator tingkat desa, dusun, RW, RT. Struktur organisasi ini disesuaikan dengan tingkat pengetahuan anggota dan untuk mengurangi inefisiensi kerja bila terlalu berbelit dan birokratis. Jadi perbedaannya dengan organisasi pemerintahan desa, penjenjangan KPL dari tingkat RT ke tingkat Desa tidak menghilangkan otonomi KPL tingkat yang rendah. Keberadaan KPL secara bertingkat dan mencakup satu wilayah desa dimaksudkan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan KPL dari tingkat RT sampai Desa, karena pada dasarnya masalah lingkungan hidup tidak dapat dibatasi oleh suatu wilayah dan masyarakat tertentu.

PENUTUP

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah berdimensi sosial, sehingga alternatif pemecahannya juga melalui pendekatan sosial, khususnya pendekatan kelembagaan. Penumbuhan dan pengembangan KPL merupakan suatu alternatif pemecahan masalah lingkungan dengan pendekatan kelembagaan. KPL ini hendaknya dimulai dengan pengidentifikasian masalah dan potensi sosial yang ada di masyarakat.

Kelembagaan norma-norma KPL sangat dipengaruhi oleh dinamika kelompok. Dalam kaitan ini struktur organisasi kelompok yang dibuat hendaknya mempertimbangkan pemberian kesempatan yang luas kepada setiap anggota untuk berkreasi, berinisiatif dan mampu mengaktualisasikan dirinya.

Pelembagaan norma-norma KPL, yaitu norma hidup nyaman dengan wawasan peningkatan kualitas lingkungan hendaknya dilakukan dengan terencana. Norma ini akan berangkat dari cara hidup menjadi suatu budaya hidup. Cara hidup memiliki norma mengikat yang rendah (renggang), sedangkan budaya hidup memiliki norma mengikat yang tinggi (kuat).

DAFTAR BACAAN

Anonim, 1990. Materi Pembekalan KKN IPB Angkata I/II 1989/1990 (Materi Umum), Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat-Institut Pertanian Bogor (LPPM - IPB).

Hubeis, Aida Vitayala Syafri dkk, 1989. Analisis Hasil Evaluasi Kegiatan Wanita Akseptor pada Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan Pendapatan Rumahtangga : Suatu Strategi memperkuat Proses Kesinambungan pemahaman Metode Keluarga Berencana Yang Nyata (Studi Kasus Pada Masyarakat di Sulawesi Utara), Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor.

Soekanto, Soerjono, 1987. Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Baru Ketiga 1987), Rajawali Pers, Jakarta>

Stoner, James A.F. dan Charles Wankel, 1986. Manajemen (Edisi KETIGA), Alih bahasa oleh Wilhelmus W. Bakowatun, SE dan Editor Drs. Heru Sutojo, MSc. (Cetakan Kedua, 1988), CV Intermedia, Jakarta.